



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI SOEPRIJANTO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 545529

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.839.000.000

1. Bangunan Seluas 38 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/55 m2 di MALANG, HASIL
SENDIRI Rp. 609.000.000
3. Tanah Seluas 193 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
4. Tanah Seluas 161 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
5. Tanah Seluas 19969 m2 di SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON GX125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2018, LAINNYA Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.434.420.727**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 3.478.420.727

III. HUTANG Rp. 362.500.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.115.920.727

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.